



MUKOMUKO

KAMIS, 21 APRIL 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Audit Kerugian Negara Tuntas Sebelum Lebaran

MUKOMUKO - Dipastikan, proses pengusutan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh akan berlangsung lebih cepat. Pasalnya, audit kerugian negara atau audit investigasi tidak membutuhkan waktu lama. Apalagi penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko tidak sampai meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit kerugian negara. Melainkan meminta langsung Inspektorat Daerah (Ipda) Mukomuko, untuk membantu pekerjaan tersebut. Alhasil, Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Ipda Mukomuko, Apriansyah, ST berkomitmen, audit tersebut akan rampung sebelum libur lebaran Idul Fitri. Sebab proses audit yang di Ipda disetor audit investasi, sedang berlangsung.

"Jaksa minta dukungan audit investigasi dari Ipda, dan kita siap. Insya Allah, secepatnya hasil audit investigasi ini akan segera keluar. Diharapkan laporan hasil pemeriksaannya (LHP) keluar sebelum lebaran. Sudah kita minta tim audit, agar segera," kata Apriansyah.

Dijelaskannya, Ipda tidak membutuhkan waktu lama melakukan audit investigasi. Pasalnya, sebelumnya telah dilakukan audit reguler. Sehingga pihaknya sudah bahan dan data-data mengenai kondisi keuangan yang terjadi di Desa Pasar Ipuh.

Apalagi, setelah LHP audit reguler keluar. Pihaknya telah memberikan pembinaan dan pengawasan atas rekomendasi yang diterbitkan. "Audit investigasi ini untuk lebih menegaskan dan melihat lebih terinci lagi. Makanya bisa lebih cepat selesai," kata Apriansyah.

Ia pun memastikan, pihaknya siap membantu aparat penegak hukum (APH). Termasuk dalam hal kesiapan sebagai saksi ahli. "Dan itu sudah berjalan. Sudah ada dari kita yang dimintai keterangan mengenai kasus itu," imbuhnya.

Apriansyah mengklaim, sebelum kasus itu masuk ke APH. Pihaknya telah terlebih dahulu membina dan mengawasi pemerintah desa tersebut. Termasuk sudah memberikan waktu hingga 60 hari, untuk kepala desa menindaklanjuti temuan Ipda. Namun pihaknya mendapati, tidak adanya itikad baik dari kepala desa dan yang terkait.

Kemudian masih memberikan jeda, sebagai bentuk toleransi. Demikian juga yang dilakukan Camat Ipuh. Disayangkan, waktu dan toleransi yang diberikan, dianggap sepele oleh kepala desa. Sehingga pihaknya pun tanpa pilihan lain, memilih berkoordinasi dengan APH. Apalagi, dari audit reguler Ipda, didapati ada indikasi kerugian negara.

"Selain diatur dalam Permendagri. Kita memang ada perjanjian kerja sama, dalam hal ini APIP dengan APH. Diantara poinnya, untuk saling bertukar informasi dan bertukar data. Terlebih lagi ketika ada indikasi kerugian negara," jelasnya.

Ia membantah, jika pengungkapan adanya dugaan korupsi DD dan ADD di desa tersebut, terkait dengan perpolitikan Pilkada tahun 2020 lalu. Sebab informasi diperoleh, sang Kades dulu kuat dugaan mendukung pasangan calon lain.

"Tidak ada kaitannya dengan politik, itu bukan ranah kami. Kerja kami jelas. Bukti semuanya jelas dan tahapannya pun jelas. Memang tidak ada niat untuk mengembalikan, dan itupun sudah kami surati kembali untuk mengingatkan. Sebelum itu, Ipda pernah berikan waktu 60 hari untuk dikembalikan. Tapi Kades juga tidak menindaklanjutinya dengan baik. Ipda pun baru masuk, setelah camat turun tangan terlebih dahulu," tandasnya. **(hue)**